

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur dan sejahtera. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa terpisah dengan masalah pendidikan bangsa. Menurut Mulyasa (2006:3) “Setidaknya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yakni : sarana gedung, buku yang berkualitas, guru dan tenaga kependidikan yang profesional.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang

demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi dunia global.

Proses pembelajaran di kelas merupakan wahana yang efektif untuk menanamkan tata nilai bagi peserta didik, karena di dalamnya terjadi proses internalisasi secara otentik, melalui proses-proses yang melibatkan seluruh potensi peserta didik. Hal ini terkait dengan karakteristik proses pembelajaran di kelas yang terstruktur, terencana dan terukur, sehingga tata nilai yang dipesankan di dalamnya akan diapresiasi secara maksimal oleh para peserta didik, dengan parameter yang jelas.

Dalam konteks pengelolaan pembelajaran, upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di sekolah guna peningkatan kualitas pembelajaran merupakan hal yang substantif, sebagai bagian dari kajian pengelolaan sekolah. Pengelolaan sumberdaya yang dimaksud adalah melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pelaksanaan, dan pimpinan dan pengendalian (Dessler, 2006:29). Sudah tentu terminologi Dessler tersebut perlu dilakukan adaptasi dengan pentahapan proses pembelajaran, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

Istilah pembelajaran banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik yang menempatkan peserta didik sebagai sumber dari kegiatan. Pembelajaran juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah peserta didik mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam media, seperti internet, TV, gambar, audio dan

sebagainya, sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peran guru dalam mengelola proses belajar mengajar.

Paradigma baru dalam konteks proses belajar mengajar yang menempatkan peserta didik sebagai sentral kegiatan, menuntut terjadinya perubahan pada diri guru dalam melaksanakan aktifitas mengajarnya. Pandangan yang beranggapan bahwa mengajar hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan itu sudah layak untuk ditinggalkan, karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Perubahan paradigma mengajar sudah tentu berimbas secara langsung pada perubahan makna terhadap pembelajaran. Pembelajaran tidak diartikan sebagai proses penyampaian materi pembelajaran, atau memberi stimulus sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, akan tetapi lebih dipandang sebagai proses mengkondisikan lingkungan agar peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, serta dialog yang maksimal antara potensi peserta didik dengan lingkungan belajarnya di sekolah.

Hasil studi intensif yang dilakukan Direktorat Dikmenum Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional (2006-2007) mengenai pola pembelajaran dan pemahaman peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan menyimpulkan bahwa pembelajaran sekolah-sekolah cenderung *text book oriented*, dan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari. Peserta kesulitan untuk memahami konsep akademik seperti yang diajarkan selama ini, yaitu menggunakan sesuatu yang abstrak dengan metode ceramah (Dirjen Mendikdasmen, 2007;273).

Sebagai generasi yang sedang berkembang, peserta didik mempunyai kebutuhan untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya, di mana mereka akan hidup dan bekerja. Akibatnya motivasi belajar peserta didik sulit ditumbuhkan dan pola belajar mereka cenderung menghafal dan mekanistik. Proses belajar yang demikian akan sulit memperoleh otentisitas hasil belajar yang memadai. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih khas lagi oleh karena berkenaan langsung dengan penanaman nilai moral.

Sebagai mata pelajaran yang memiliki dimensi pendidikan moral di sekolah, PKn mengemban misi untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Salah satu unsur penting warga negara yang baik adalah memiliki dan menumbuhkembangkan karakter sesuai dengan budaya bangsa, sehingga dia akan dapat mengambil peran dalam melakukan pembangunan masyarakat.

Hal inilah yang harus menjadi komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, untuk membuat suatu regulasi praktis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengawal pendidikan karakter. Komitmen tersebut kemudian perlu direspon secara aktif oleh para pakar Pendidikan Kewarganegaraan untuk membuat model manajemen pembelajaran yang membawakan misi sebagai pembangunan karakter.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembangun karakter dirasakan amat perlu pengembangannya bila mengingat makin meningkatnya tawuran antar pelajar, pemerasan, kekerasan, kecenderungan dominasi senior terhadap

junior, penggunaan narkoba dan lain-lain. Bahkan yang paling memprihatinkan, keinginan untuk membangun sifat jujur pada anak melalui kantin kejujuran di sejumlah sekolah belum sesuai dengan harapan. Disiplin dan tertib berlalu lintas, budaya antre, budaya hidup bersih dan sehat, keinginan menghargai lingkungan masih jauh di bawah standar.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya pendidikan yang berusaha menyelami aspek-aspek yang terdapat dalam diri manusia, untuk diarahkan, dibina, dan dikembangkan agar selaras dengan standar moral yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Nasution, 1989:15).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter/moral di sekolah. Eksistensi PKn ini sudah tentu tidak *moral free*, melainkan *moral based*. Yang dijadikan moral dasarnya adalah Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah proses manajemen, pembelajaran di dalam kelas haruslah terbangun dari seluruh pentahapan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, sampai pada evaluasi/pengendalian; yang merupakan pilar-pilar dari manajemen pendidikan, dengan mengintegrasikan secara simultan anasir manajemen. Seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam konteks manajemen pendidikan merupakan manajer pembelajaran, harus mampu mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Potensi yang dimaksud adalah berupa segala sumber daya yang

ada, yang memberikan kontribusi pada berlangsungnya proses pembangunan karakter.

Materi keilmuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi afektif, kognitif, dan psikomotorik (Depdiknas, 2006:73). Berkenaan dengan aspek afektif, diharapkan peserta didik memiliki: keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama masing-masing yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, memiliki nilai-nilai etika dan estetika, serta mampu mengamalkan dan mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari; memiliki nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan humaniora, serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik dalam lingkup nasional maupun global.

Berkenaan dengan aspek kognitif, diharapkan peserta didik menguasai ilmu, teknologi, dan kemampuan akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan berkenaan dengan aspek psikomotorik, diharapkan peserta didik memiliki keterampilan berkomunikasi, kecakapan hidup, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sosial, budaya dan lingkungan alam baik lokal, regional, maupun global; memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bermanfaat untuk melaksanakan tugas/kegiatan sehari-hari.

Ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip

Kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis konstitusional, dan berkarakter.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dalam paraktek pembelajaran di kelas guru harus memahami strategi apa yang dibutuhkan supaya ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan pada akhir pembelajaran. Melihat fakta yang terjadi pada saat ini, sering terjadi tawuran antar pelajar, kenakalan remaja, dan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran PKn belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kenyataan di lapangan dalam pembelajaran PKn di tingkat sekolah dasar dan menengah masih sering ditemukan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah lebih banyak diarahkan pada penguasaan pengetahuan, hafalan dan pengerjaan tugas-tugas. *Kedua*, materi pelajaran lebih bersifat *text book oriented*, yang berarti bahwa sumber pembelajaran sebagian besar adalah buku teks. *Ketiga*, suasana pembelajaran lebih dominan bersifat *one way communication*, dengan guru mengambil peran sebagai pentransfer materi, sedangkan peserta didik menerima dengan tenang.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia pendidikan melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tidak boleh terpaku pada pola pembelajaran konvensional

seperti tersebut diatas. Pelaksanaan pembelajaran di kelas harus menggunakan pendekatan, metode, strategi, teknik dan taktik pembelajaran yang tepat, sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan baik, kemudian dapat menerapkan nilai-nilai atau karakter yang terkandung didalamnya dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang baik belum menjamin tercapainya tujuan pembelajaran, kalau tidak disertai sikap dan perilaku disiplin oleh semua pihak yang terkait dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala madrasah sebagai penanggung jawab di sekolah harus selalu mengawasi dan memantau pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya. Guru yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan pembelajaran di kelas harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan disiplin. Demikian pula siswa sebagai obyek harus bersikap disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian tujuan pembelajaran akan dapat dicapai sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Kabupaten Wonogiri memiliki 5 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan 17 Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta yang pada umumnya pengelolaan pembelajarannya masih dilakukan secara konvensional. Artinya pelaksanaan pembelajarannya masih menggunakan sarana dan prasarana seadanya (khususnya MTs swasta). Melihat kenyataan tersebut Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Wonogiri yang merupakan MTs tertua di Kabupaten Wonogiri yang telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agar dapat bersaing dengan SMP favorit, dengan selalu meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga



kependidikan, proses pembelajaran, serta sarana dan prasarana pendidikan. Khususnya dalam pembelajaran PKn guru selalu berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Usaha tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan di MTs Negeri 1 Wonogiri. MTs Negeri 1 Wonogiri mengalami peningkatan baik dari kuantitas maupun kualitas peserta didik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui tentang Pengelolaan Pembelajaran PKn Berkarakter Disiplin di MTs Negeri 1 Wonogiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran PKn berkarakter disiplin di MTs Negeri 1 Wonogiri ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn berkarakter disiplin di MTs Negeri 1 Wonogiri ?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran PKn berkarakter disiplin di MTs Negeri 1 Wonogiri?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran PKn berkarakter disiplin di MTs Negeri 1 Wonogiri.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PKn berkarakter disiplin di MTs Negeri 1 Wonogiri.
3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran PKn berkarakter disiplin di MTs Negeri 1 Wonogiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pengelolaan pembelajaran PKn berkarakter disiplin di MTs Negeri 1 Wonogiri.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian empiris tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran PKn di sekolah/madrasah serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Membantu sekolah/madrasah dalam memberikan informasi tentang pengelolaan pembelajaran PKn sehingga dapat membuat kebijakan yang tepat.